

Nama : Fadhilah Izdihar

NPM : 2413031068

MK : Teori Akuntansi

PT Garuda Sejahtera adalah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di bidang penerbangan. Dalam laporan keuangan terbarunya, perusahaan mengakui pesawat-pesawat yang dimiliki berdasarkan **nilai wajar (fair value)** sesuai dengan pendekatan IFRS (International Financial Reporting Standards).

Namun, auditor memberikan catatan bahwa penentuan nilai wajar tersebut tidak mencerminkan kondisi pasar di Indonesia secara akurat, karena pasar aktif untuk pesawat di Indonesia sangat terbatas. Auditor menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan penggunaan **biaya historis (historical cost)** yang lebih konservatif.

Sementara itu, PT Garuda Sejahtera menyatakan bahwa pendekatan nilai wajar lebih mencerminkan "**substance over form**" dan **kebutuhan investor global**, karena perusahaan ingin menarik investor asing. Dalam penyusunannya, perusahaan mengacu pada **kerangka konseptual IFRS, bukan kerangka konseptual PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)**.

Beberapa anggota dewan komisaris mempertanyakan:

1. Apakah penggunaan kerangka konseptual global (IFRS) sah diterapkan untuk perusahaan di Indonesia?
Secara formal, perusahaan di Indonesia wajib menggunakan PSAK sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, karena PSAK merupakan standar resmi yang ditetapkan oleh IAI/DSAK dan diakui oleh regulator (OJK, BEI). Dengan demikian, penggunaan kerangka konseptual IFRS secara langsung **tidak sah**. Namun, perlu dicatat bahwa kerangka konseptual PSAK telah dikonvergensi dengan IFRS, sehingga substansi keduanya hampir sama. Oleh karena itu, perusahaan dapat merujuk pada IFRS sebagai referensi tambahan, tetapi yang berlaku secara hukum di Indonesia tetap PSAK.
2. Apakah kerangka konseptual PSAK sudah cukup memadai untuk menjawab dinamika bisnis global?
Kerangka konseptual PSAK pada dasarnya **sudah cukup** memadai untuk menjawab dinamika bisnis global, karena sejak 2012 PSAK telah dikonvergensi dengan IFRS dan kerangka konseptualnya mengikuti IFRS 2019. Hal ini membuat laporan keuangan perusahaan Indonesia dapat dibandingkan secara internasional dan relevan bagi investor global. Namun, tingkat kedalaman penerapan masih bergantung pada kondisi pasar, infrastruktur profesi akuntansi, dan regulasi di Indonesia. Dengan kata lain, secara konseptual PSAK sudah memadai, tetapi dalam praktiknya tetap diperlukan penguatan kapasitas dan penyesuaian lokal agar mampu menjawab kompleksitas bisnis global secara efektif.

3. Apakah nilai wajar benar-benar mencerminkan realitas ekonomi yang bisa diandalkan dalam konteks Indonesia?

Nilai wajar tidak selalu sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi yang bisa diandalkan di Indonesia. Dalam kondisi pasar yang aktif dan likuid, fair value relevan karena memberikan informasi terkini yang berguna bagi pengambilan keputusan. Namun, di Indonesia banyak pasar yang kurang likuid, termasuk pasar pesawat, sehingga penentuan nilai wajar sering bergantung pada asumsi dan estimasi (Level 3). Hal ini mengurangi tingkat verifiability dan faithful representation. Dengan demikian, fair value memang meningkatkan relevansi, tetapi keandalannya dalam konteks Indonesia harus dipertimbangkan secara hati-hati dan disertai pengungkapan yang memadai.

Pertanyaan :

Kritisi keputusan PT Garuda Sejahtera dalam memilih nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan secara konseptual dalam konteks Indonesia? Jelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam kerangka konseptual PSAK dan IFRS.

Keputusan PT Garuda Sejahtera menggunakan nilai wajar (fair value) dapat dibenarkan secara konseptual karena PSAK (PSAK 16) maupun IFRS (IAS 16) memang memberikan opsi untuk mengukur aset tetap dengan model biaya atau revaluasi (nilai wajar). Nilai wajar juga sejalan dengan tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi, terutama bagi investor global.

Namun, dalam konteks Indonesia, penerapan fair value menghadapi tantangan serius. Pasar pesawat di Indonesia tidak aktif, sehingga penentuan nilai wajar cenderung mengandalkan asumsi dan estimasi (Level 3), yang berpotensi mengurangi faithful representation dan verifiability. Hal ini membuat laporan keuangan kurang dapat diandalkan meskipun relevan. Dengan demikian, keputusan Garuda dapat dibenarkan secara konseptual, tetapi secara praktis harus dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai dan pertimbangan reliabilitas.

Bandingkan kerangka konseptual PSAK (Indonesia) dan IFRS dalam hal:

- a. Tujuan laporan keuangan

PSAK: Memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lain dalam pengambilan keputusan ekonomi, dengan tetap tunduk pada regulasi Indonesia.

IFRS: Memberikan informasi berguna untuk keputusan ekonomi investor dan kreditur, serta menilai stewardship manajemen.

Keduanya sama, hanya PSAK berlaku dalam kerangka hukum nasional.

- b. Karakteristik kualitatif informasi

PSAK & IFRS: Sama-sama menekankan relevance dan faithful representation sebagai karakteristik fundamental, dengan pendukung comparability, verifiability, timeliness, dan understandability.

Bedanya, dalam praktik PSAK sering lebih menekankan konservatisme (prudence) karena mempertimbangkan kondisi pasar domestic

c. Basis pengukuran

IFRS: Mengakui berbagai basis pengukuran: historical cost, fair value, current cost, value in use, fulfilment value.

PSAK: Mengikuti IFRS, misalnya PSAK 16 mengizinkan model biaya atau revaluasi. Namun, implementasi sering lebih berhati-hati karena keterbatasan pasar aktif di Indonesia.

d. Asumsi entitas dan kelangsungan usaha

PSAK & IFRS: Sama-sama mengasumsikan entitas sebagai going concern kecuali ada indikasi kuat sebaliknya. Jika terdapat keraguan material, harus diungkapkan.

Apakah Anda setuju bahwa Indonesia sebaiknya mengikuti sepenuhnya kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal? Jelaskan pendapat Anda dengan argumen kritis, mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan tingkat kematangan pasar di Indonesia

Tidak setuju bahwa Indonesia sebaiknya mengikuti sepenuhnya kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal. Konvergensi mendalam dengan IFRS penting — tetapi penerapan “copy-paste” tanpa adaptasi operasional dan regulasi berisiko menimbulkan distorsi dan biaya yang besar. Berikut argumen kritis yang ringkas, terstruktur, dan langsung ke poin.